

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang Penelitian

Dalam sistem perekonomian satu negara, industri perbankan merupakan salah satu sektor yang penting sebagai penunjang perekonomian. Di Indonesia sendiri lembaga perbankan merupakan mitra usaha yang sangat penting bagi perusahaan dagang maupun perusahaan jasa. Perusahaan-perusahaan tersebut membutuhkan dana yang cukup besar dalam upaya membiayai kegiatan usahanya. Kemudian dalam penyediaan dana untuk koperasi perusahaan tersebut dapat diperoleh dari fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh perbankan. Oleh karena itu, perbankan merupakan lembaga keuangan yang memegang peranan penting dalam kehidupan perekonomian.

Dalam pembangunan ekonomi diperlukan peran serta lembaga keuangan untuk membiayai, karena pembangunan sangat memerlukan tersedianya dana. Lembaga keuangan yang terlibat dalam suatu pembiayaan ekonomi dibagi menjadi dua yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank menurut undang-undang perbankan, bank dapat dibedakan menjadi dua jenis bank umum dan BPR. Kondisi dunia perbankan saat ini telah mengalami banyak perubahan dari waktu ke waktu. Perubahan ini selain disebabkan perkembangan internal dunia perbankan, juga tidak terlepas dari pengaruh perkembangan di luar dunia perbankan. Menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan lagi kepada masyarakat berupa pinjaman, kredit, dan sejenisnya, dan salah satu kegiatan bank adalah pemberian kredit.

Pemberian kredit memiliki sebuah resiko yaitu adanya kredit macet. Bahaya yang timbul dari kredit macet adalah tidak terbayarnya kembali kredit tersebut, baik sebagian maupun seluruhnya. Kredit macet banyak terjadi sebagai akibat analisis pemberian persetujuan kredit yang tidak begitu ketat. Kredit macet memberikan dampak yang kurang tidak baik bagi suatu negara, masyarakat, dan perbankan Indonesia. Likuiditas, Solvabilitas dan Profitabilitas baik sangat dipengaruhi oleh keberhasilan bank dalam mengelola kredit yang disalurkan.

Untuk itu maka diperlukan sistem pengendalian intern yang kuat sebagai dasar kegiatan operasional bank yang sehat dan aman dalam manajemen bank. Pengendalian atas pemberian kredit sangatlah penting bagi sebuah bank karena pemberian kredit merupakan salah satu sumber utama pendapatan bank yang berupa bunga kredit dan juga sekaligus sebagai sumber resiko operasi bisnis terbesar. Resiko yang mungkin terjadi bagi bank tersebut adalah resiko kemacetan yang disebabkan kelemahan bank dalam hal kebijakan pemberian kredit, pengawasan serta penagihan.

Pengelolaan kredit yang dilakukan oleh bank adalah suatu hal yang penting dilakukan agar kredit dapat berjalan dengan baik dan meminimalkan hal-hal yang mungkin terjadi diluar perhitungan. Melakukan pengolahan kredit berarti melaksanakan fungsi- fungsi manajemen, dimana dalam mengelola dan mengatur kredit perlu dilakukan perencanaan yang matang. Kemudian setelah direncanakan maka diorganisasikan, agar perencanaan tersebut lebih terarah. Organisasi sangat penting karena merupakan tempat

bagi suatu bank dalam mencapai tujuannya. Pelaksanaan pengelolaan kredit dapat meningkatkan keuntungan bagi sebuah bank. Memperoleh keuntungan merupakan tujuan utama bagi suatu perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan kunci dari keberhasilan manajemen bank adalah bagaimana bank tersebut bisa merebut hati masyarakat. Dalam memberikan kredit, kepada pihak nasabah disuatu bank harus memiliki sistem pengendalian intern harus dilaksanakan sebaik-baiknya, dimana sistem pengendalian intern yang baik akan sangat membantu organisasi dalam menghindari atau kecurangan-kecurangan yang akan merugikan nasabah serta bank (organisasi) itu sendiri.

Sistem pengendalian intern yang kuat sangat diperlukan dalam pemberian kredit sebagai dasar kegiatan operasional bank yang sehat dan aman dalam manajemen bank. Pemberian kredit merupakan salah satu sumber utama pendapatan bank yang berupa bunga kredit dan sekaligus sebagai sumber resiko operasi bisnis terbesar, kelemahan bank dalam hal kebijakan pemberian kredit, pengawasan dan penagihan memerlukan suatu sistem pengendalian intern yang baik untuk mengendalikan resiko pemberian kredit sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi bank.

Secara umum pengendalian intern merupakan bagian dari masing-masing sistem yang dipergunakan sebagai prosedur dan pedoman pelaksanaan operasional perusahaan atau organisasi tertentu, sedangkan sistem pengendalian intern merupakan kumpulan dari pengendalian intern yang terintegrasi, berhubungan dan saling mendukung satu dengan yang lainnya.

Pengendalian intern berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan. Gambaran tentang keadaan keuangan perusahaan perlu diketahui untuk mengetahui kinerja keuangan perusahaan tersebut. Analisis terhadap data keuangan dari perusahaan yang bersangkutan.

Pada umumnya analisis kredit mencakup pengumpulan informasi, pembuatan dan analisis informasi yang dikumpulkan, menyusun dan menyimpan informasi untuk keperluan dimasa yang akan datang. Pada sebagian bank, departemen kredit mungkin memberikan rekomendasi tentang permohonan kredit tetapi keputusan akhir tentang pemberian suatu pinjaman diserahkan kepada pejabat kredit atau komite kredit. Pada tahap analisis ini kemungkinan terjadinya kesalahan dan penyelewengan sangat besar. Jika kesalahan dan penyelewengan tersebut tidak segera diketahui maka akan menyebabkan terjadinya kredit macet yang akan merugikan bank tersebut.

Mengetahui betapa pentingnya masalah perkreditan dalam kehidupan perbankan, maka diperlukan pengendalian yang ketat terhadap pinjaman yang diberikan kepada nasabah. Sehingga nasabah dapat memahami pinjaman yang diberikan, tidak akan cukup dikembalikan hanya dengan jaminan. Jika terjadi kemacetan dalam pemberian kredit tersebut, bank bisa mengalami kebangkrutan karena terlalu banyaknya nasabah yang tidak bisa melunasi kreditnya. Sehingga untuk mengetahui adanya suatu penyimpangan atau kesalahan dalam suatu bank maka harus sering dilakukan evaluasi dan perlu ada sistem pengendalian pemberian kredit yang efektif untuk menghindari kredit macet.

Berikut ini adalah jumlah debitur kredit macet pada tahun 2018 dan 2019 :

Tabel 1.1.

Data Debitur Kredit Macet KCP Pancur Batu tahun 2018 dan 2019

2018			2019	
Bulan	Jumlah Nasabah Kredit Macet	Total Baki Debet	Jumlah Nasabah Kredit Macet	Total Baki Debet
Januari	50	1,972,646,572.00	65	2,856,349,949.00
Februari	51	2,048,000,754.00	61	2,793,045,401.00
Maret	51	2,171,434,250.00	60	2,775,438,655.00
April	55	2,389,447,081.00	62	3,300,464,797.00
Mei	63	2,696,753,248.00	65	3,504,647,974.00
Juni	68	3,525,072,241.00	69	3,801,504,891.00
Juli	66	3,404,579,760.00	73	3,899,388,813.00
Agustus	67	3,571,583,975.00	70	3,571,583,975.00
September	63	3,089,872,662.00	65	3,210,464,460.00
Oktober	62	3,295,946,399.00	60	2,024,679,794.00
November	63	3,358,151,034.00	58	2,900,741,730.00
Desember	64	2,785,209,345.00	55	2,704,317,943.00

Sumber : PT. Bank SUMUT KCP Pancur Batu Medan

Pada tabel 1.1. merupakan data perolehan debitur kredit macet yang dimiliki PT. Bank Sumut KCP Pancur Batu, berdasarkan data yang diperoleh dari hasil pertimbangan perbulannya, disimpulkan bahwa debit kredit macet pada tahun

2018, 2019 mengalami perbedaan total baki debetnya. Dimana di tahun 2018 pada akhir bulan desember mengalami penurunan total baki debet, akan tetapi jumlah nasabah kredit macetnya mengalami penambahan satu nasabah. Dan ditahun 2019 pada akhir bulan desember juga mengalami penurunan dalam total baki debetnya, dan jumlah nasabah kredit macet juga tidak ada penambahan nasabah di bulan desember.

PT. Bank SUMUT memiliki target *Non Performing Loan* kredit modal kredit macet dimana setiap kantor cabang memiliki target yang berbeda-beda. PT. Bank Sumut KCP Pancur Batu menetapkan target NPL di tahun 2018 sebesar 2,6% dan di tahun 2019 sebesar 2,2%. Maka perlu diketahui bagaimana dalam pemberian kredit macet sehingga mampu meminimalisir kredit macet.

Dengan kata lain tingkat kolektibilitas dari pinjaman debitur antara tahun 2018 dan 2019 di setiap bulannya mengalami perbedaan persentase dalam pemberian kredit macet oleh PT. Bank Sumut yang disebabkan karena:

1. Pemberian kredit macet kepada calon debitur kurang hati-hati.
2. Ketidakmampuan nasabah dalam membayar hutang-hutang yang disebabkan masalah ekonomi,
3. Usaha yang dikelola pailit, sehingga tidak mampu membayar hutang.
4. Kurangnya pengawasan dari pihak bank yang mengenai perkembangan usaha debitur.

Oleh karena itu, penulis memandang bahwa dalam pemberian kredit macet, pengawasan pemberian kredit macet juga memegang peranan penting dalam hal pengembalian pinjaman oleh debitur.

Maka dari uraian diatas, penelitian ini ditulis dengan judul “**EVALUASI SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMBERIAN KREDIT PADA PT. BANK SUMUT CABANG SIMPANG KWALA UNIT KCP PANCUR BATU**”

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka perumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah Bagaimana penerapan sistem pengendalian intern pemberian kredit serta efektivitasnya pada PT. Bank Sumut Cabang Simpang Kwala Unit KCP Pancur Batu, Medan ?

Tujuan Penelitian

Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui gambaran tentang penerapan pengendalian intern pemberian kredit pada PT. Bank Sumut, Cabang Simpang Kwala Unit KCP Pancur Batu , Medan.
2. Untuk mengetahui tingkat keefektifan pengendalian intern dalam pemberian kredit pada PT. Bank Sumut, Cabang Simpang Kwala Unit KCP Pancur Batu, Medan.

Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Bagi peneliti, penulisan tugas akhir ini berguna untuk persyaratan Akademik dalam menyelesaikan studi dari Fakultas Ekonomi Program S1 Akuntansi Universitas HKBP Nommensen, sebagai bahan perbandingan bagi penulis antara teori yang diperoleh selama pendidikan dengan penerapannya yang dijumpai di dalam perusahaan dan juga berguna menambah pengalaman dalam bidang sistem pemberian kredit pada prakteknya di lapangan.
2. Bagi Perusahaan, dapat memberikan masukan dan sumbangan pemikiran dalam hal pengendalian intern pemberian kredit untuk menerapkan pengendalian intern yang baik dan efektif.
3. Bagi penelitian lain, sebagai bahan referensi dan informasi tambahan dalam melakukan penelitian mengenai penerapan pengendalian intern terhadap pemberian kredit ditahun yang akan mendatang.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Bank

2.1.1. Pengertian Bank

Bank berasal dari kata Italia *banco* yang artinya *bangku*. Bangku inilah yang dipergunakan oleh banker untuk melayani kegiatan operasionalnya kepada para nasabah. Istilah bangku secara resmi dan populer menjadi *Bank*. Bank termasuk perusahaan industri jasa karena produknya hanya memberikan pelayanan jasa kepada masyarakat.

Secara Sederhana bank diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat jasa- jasa bank lainnya. Kemudian dalam buku kasmir Menurut Undang- undang Nomor 10 Tahun 1998 yang dimaksud dengan bank adalah **“badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan ke masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk- bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.”**

2.1.2. Fungsi Bank

Menurut Sigit Triandaru dalam buku Bank dan Lembaga Keuangan Lain, secara umum fungsi utama bank adalah: “ **menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat untuk berbagai tujuan atau sebagai *financial intermediary***”. Secara lebih spesifik bank dapat berfungsi sebagai *agent of trust*, *agent of development*, dan *agent of services*.

- a. *Agent of trust*
- b. *Agent of development*
- c. *Agent of services*.

Adapun penjelasan dari fungsi ketiga tersebut adalah sebagai berikut:

a. *Agent of trust*

Dasar utama kegiatan perbankan adalah kepercayaan (*trust*), baik dalam hal penghimpunan dana maupun penyaluran dana. Masyarakat akan mau menitipkan dananya di bank apabila dilandasi adanya unsur kepercayaan.

b. *Agent of development*

Kegiatan perekonomian masyarakat di sektor moneter dan di sektor rill tidak dapat dipisahkan. Kedua sektor tersebut selalu berinteraksi dan saling memengaruhi. Sektor rill tidak dapat berkinerja baik apabila sektor moneter tidak bekerja dengan baik. Kegiatan bank berupa penghimpunan dan penyaluran dana sangat diperlukan bagi kegiatan perekonomian di sektor rill.

c. *Agent of services*

Di samping melakukan kegiatan penghimpunan dana, bank juga memberikan penawaran jasa perbankan yang lain kepada masyarakat. Jasa

yang ditawarkan bank ini erat kaitannya dengan kegiatan perekonomian masyarakat secara umum. Jasa ini antara lain dapat berupa jasa pengiriman uang, penitipan barang berharga, pemberian jaminan bank dan penyelesaian tagihan.

Ketiga fungsi bank diatas diharapkan dapat memberikan gambaran yang menyeluruh dan lengkap mengenai fungsi bank dalam perekonomian, sehingga bank tidak hanya dapat diartikan sebagai lembaga perantara keuangan (*financial intermediary institution*).

2.1.3. Sumber Dana Bank

Dana bank yang digunakan sebagai alat untuk melakukan aktivitas-aktivitas usaha dapat digolongkan menjadi tiga, yaitu sebagai berikut :

- a. Dana Sendiri**
- b. Pinjaman**
- c. Pihak ketiga.¹**

Adapun penjelasannya sebagai berikut ini :

- a. Dana Sendiri

Disebut juga dengan dana modal atau dana pihak I, adalah merupakan dana yang dihimpun dari pihak para pemegang saham bank atau pemilik bank.

Dana yang dihimpun dari pemilik tersebut dapat digolongkan menjadi:

1. Modal disetor, merupakan dana awal yang disetorkan oleh pemilik pada saat awal bank didirikan.

¹ Ismail, **Manajemen Perbankan: Dari Teori Menuju Aplikasi**, Edisi Pertama, Cetakan Kesatu: Kencana, Jakarta, 2010, hal.40

2. Cadangan, sangat diperlukan oleh bank terutama untukantisipasi apabila terdapat kerugian di masa yang akan datang. Menurut Kuncoro dan Suharjono **“Cadangan, yaitu sebagian dari laba yang disisihkan dalam bentuk cadangan modal dan lainnya yang akan digunakan untuk menutup timbulnya risiko di kemudian hari”**.
3. Sisa Laba, merupakan akumulasi dari keuntungan yang diperoleh oleh bank setiap tahun. Sisa laba juga terdiri dari laba/ rugi tahun-tahun lalu dan laba/ rugi tahun berjalan.

b. Dana Pinjaman

1. Pinjaman dari Bank Lain di Dalam Negeri

Pinjaman yang berasal dari pihak bank lain ini biasa dikenal dengan pinjaman antarbank (*Interbank Call Money*). Pinjaman tersebut diperlukan apabila terdapat kebutuhan dana mendesak yang diperlukan oleh bank dalam rangka menutup kekurangan likuiditas yang diwajibkan oleh Bank Indonesia.

2. Pinjaman dari Bank atau Lembaga Keuangan di Luar Negeri

Pinjaman yang berasal dari luar negeri harus melalui Bank Indonesia. Bank Indonesia bertindak sebagai pengawas pinjaman luar negeri tersebut. Jangka waktu pinjaman yang diberikan adalah jangka menengah dan jangka panjang.

3. Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank

Pinjaman dari LKBB ini sering tidak merupakan pinjaman atau kredit, dalam arti bank tidak memperoleh dana tunai dari pihak kreditur.

4. Obligasi

Obligasi merupakan surat utang jangka panjang. Dengan menerbitkan obligasi dan menjualnya, maka bank memperoleh dana dari pembelinya. Pembeli obligasi bisa bank, bukan bank, maupun perorangan.

c. Dana Pihak Ketiga,

Biasanya lebih dikenal dengan nama masyarakat, merupakan dana yang dihimpun oleh bank yang berasal dari masyarakat dalam arti luas, meliputi masyarakat individu, maupun badan usaha. Sumber dana yang berasal dari pihak ketiga antara lain Simpanan giro (*demand deposit*), Tabungan (*saving*), Deposito (*time deposit*).

2.2. Sistem Pengendalian Intern

2.2.1. Pengertian Sistem Pengendalian Intern

Secara umum, pengendalian internal merupakan bagian dari masing-masing sistem yang dipergunakan sebagai prosedur dan pedoman operasional perusahaan atau organisasi tertentu. Perusahaan pada umumnya menggunakan sistem pengendalian internal untuk mengarahkan operasi perusahaan dan mencegah terjadinya penyalahgunaan sistem. Oleh karena pentingnya pemberian kredit bagi pihak PT. Bank Sumut Cabang Simpang Kwala Unit KCP Pancur Batu, maka perlu adanya suatu sistem pengendalian yang baik dari pihak manajemen perusahaan terhadap prosedur pemberian kredit tersebut.

Sistem pengendalian intern terdiri atas berbagai kebijakan, praktik dan prosedur yang ditetapkan oleh perusahaan untuk mencapai empat tujuan umumnya:

1. Menjaga aktiva perusahaan
2. Memastikan akurasi dan keandalan catatan serta informasi akuntansi
3. Mendorong efisiensi dalam operasional perusahaan
4. Mengukur kesesuaian dengan kebijakan serta prosedur yang ditetapkan oleh pihak manajemen.

Menurut Mulyadi :

Pengendalian intern sebagai suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen, dan personel lain yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan berikut ini:

- 1. Keandalan pelaporan keuangan.**
- 2. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.**
- 3. Efektivitas dan efisiensi operasi.²**

Pengertian dari pengendalian kredit bank adalah Pengendalian kredit mutlak dilaksanakan untuk menghindari terjadinya kredit macet dan penyelesaian kredit macet.

Sistem pengendalian intern pemberian kredit di bank ialah suatu sistem pengendalian intern yang membutuhkan pengendalian untuk melakukan suatu tindakan didalam pemberian kredit kepada nasabah yang membutuhkan. Di pemberian kredit juga salah satu bisnis utama bank yang menghasilkan pendapatan bagi perusahaan dan merupakan salah satu bagian terbesar aktiva yang dimiliki oleh perusahaan.

² Mulyadi, *Auditing*, Buku I, Edisi 6: Salemba Empat, Jakarta, 2014, hal 180.

Menurut COSO, sistem pengendalian intern memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a. Sistem pengendalian intern merupakan sebuah proses, sehingga tidak pernah berhenti bekerja.
- b. Sangat dipengaruhi oleh orang dari berbagai tingkatan manajemen didalam perusahaan.
- c. Hanya dapat memberikan perlindungan secara *reasonable* (sewajarnya), karena harus memperhatikan keuntungan dan kerugian (*cost and benefit*).
- d. Ditujukan untuk melindungi tujuan perusahaan secara keseluruhan, tidak hanya terhadap laporan keuangan saja.
- e. Memiliki berbagai komponen yang berbeda- beda fungsinya namun saling terkait.³

Dengan uraian diatas terlihat bahwa pihak yang bertanggung jawab terhadap perancangan dan pelaksanaan sistem pengendalian intern di dalam perusahaan adalah manajemen puncak. Manajemen puncak harus menjelaskan dan mengkonsumsikan rencana pengawasan kepada semua pihak yang ada dalam organisasi, sehingga akan mendapat dukungan yang kuat. Karyawan tidak akan terkejut mengapa gudang bahan baku dikunci sepanjang hari, atau karyawan harus mengisi presensi setiap kali masuk dan keluar kantor. Ini semua digunakan untuk melakukan pengawasan yang baik.

Sistem tersebut terdiri dari kebijakan, teknik, prosedur, alat- alat fisik, dokumentasi orang- orang dengan berinteraksi atau sama lain diarahkan untuk melindungi harta, menjamin terhadap terjadinya utang yang tidak layak, menjalin ketelitian dan dapat dipercayainya data akuntansi dan dapat diperolehnya operasi secara efisien dan menjamin ditaatinya kebijakan perusahaan.

³ **Ibid.** hal,115

Sistem pengendalian intern meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran yang diorganisasikan untuk menjaga harta kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi serta mendorong setiap pihak dalam organisasi untuk dapat mematuhi semua kebijakan yang telah ditetapkan.

2.2.2. Tujuan Sistem Pengendalian Intern

Menurut Mulyadi, tujuan pengendalian intern adalah sebagai berikut:

- 1. Keandalan informasi keuangan**
- 2. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku**
- 3. Efektivitas dan efisiensi operasi ⁴**

Tujuan utama dari sistem pengendalian intern dalam suatu perbankan dapat dibedakan dalam empat tujuan pokok yaitu:

1. Menjaga kekayaan organisasi
2. Mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi
3. Mendorong efisiensi
4. Mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen

2.2.3 Unsur-Unsur Sistem Pengendalian Intern

Unsur pokok sistem pengendalian internal adalah:

- 1. Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tegas.**
Struktur organisasi merupakan kerangka (*framework*) pembagian tanggung jawab fungsional kepada unit-unit organisasi yang dibentuk untuk melaksanakan pokok perusahaan. Pembagian tanggungjawab

⁴ **Ibid**, hal 180

fungsi dalam organisasi ini didasarkan pada prinsip-prinsip berikut ini:

- a. Harus dipisahkan fungsi-fungsi operasi dan penyimpanan dari fungsi akuntansi. Fungsi operasi adalah fungsi yang memiliki wewenang untuk melaksanakan suatu kegiatan. Fungsi penyimpanan adalah fungsi yang memiliki wewenang untuk menyimpan aktiva perusahaan. Fungsi akuntansi adalah fungsi yang memiliki wewenang untuk mencatat peristiwa keuangan perusahaan.
 - b. Suatu fungsi tidak boleh diberi tanggung jawab penuh untuk melaksanakan semua tahap suatu transaksi.
2. Sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan perlindungan yang cukup terhadap kekayaan, utang, pendapatan dan biaya.

Dalam organisasi, setiap transaksi hanya terjadi atas dasar otorisasi dari pejabat yang memiliki wewenang untuk menyetujui terjadinya transaksi tersebut. Oleh karena itu, dalam organisasi harus dibuat sistem yang mengatur pembagian wewenang untuk otorisasi atas terlaksananya setiap transaksi. Sistem otorisasi akan menjamin dihasilkannya dokumen pembukuan yang dapat dipercaya, sehingga akan menjadi masukan yang dapat dipercaya bagi proses akuntansi. Selanjutnya, prosedur pencatatan yang baik akan menghasilkan informasi yang teliti dan dapat dipercaya mengenai kekayaan, utang, pendapatan, dan biaya suatu organisasi.

3. Praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit organisasi.

Pembagian tanggungjawab fungsional dan sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang telah ditetapkan tidak akan terlaksana dengan baik jika tidak diciptakan cara-cara untuk menjamin praktik yang sehat dalam pelaksanaannya. Adapun cara-cara yang umumnya ditempuh oleh perusahaan dalam menciptakan praktik yang sehat adalah:

- a. Penggunaan formulir bernomor urut tercetak yang pemakaiannya harus dipertanggungjawabkan oleh yang berwenang.
 - b. Pemeriksaan mendadak
 - c. Setiap transaksi tidak boleh dilaksanakan dari awal sampai akhir oleh satu orang atau satu unit organisasi.
 - d. Perputaran jabatan.
 - e. Keharusan pengambilan cuti bagi karyawan yang berhak.
 - f. Secara periodik diadakan pencocokan fisik kekayaan dengan catatannya
 - g. Pembentukan unit organisasi yang bertugas untuk mengecek efektivitas unsur-unsur sistem pengendalian internal lain.
4. Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya.

Bagaimanapun baiknya struktur organisasi, sistem otorisasi dan prosedur pencatatan, serta berbagai cara yang diciptakan untuk mendorong praktik yang sehat, semuanya tergantung kepada manusia yang melaksanakannya. Jika perusahaan memiliki karyawan yang kompeten dan jujur, unsur pengendalian yang lain dapat dikurangi sampai batas yang minimum, dan perusahaan tetap mampu menghasilkan pertanggungjawaban keuangan yang dapat diandalkan. Karyawan yang berkompeten bisa didapatkan oleh perusahaan dengan cara menyeleksi calon karyawan berdasarkan persyaratan yang dituntut oleh pekerjaannya dan melakukan pengembangan pendidikan karyawan selama menjadi karyawan perusahaan, sesuai dengan tuntutan perkembangan pekerjaannya

2.3. Pengertian Dan Jenis- jenis Kredit

2.3.1. Pengertian Kredit dan Unsur-unsur Kredit

Menurut Kasmir, “kata kredit berasal dari kata *credere* yang artinya adalah kepercayaan, maksudnya adalah apabila seseorang memperoleh kredit, berarti mereka memperoleh kepercayaan. Sementara itu, bagi si pemberi kredit artinya memberikan kepercayaan kepada seseorang bahwa uang yang dipinjamkan pasti kembali.”⁵

Menurut Hasibuan Malayu tahun 1996, kredit adalah ”semua jenis pinjaman yang harus dibayar kembali bersama bunganya oleh peminjam sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.”⁶

Pengertian kredit menurut UU RI No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan Bab 1, Pasal 1, ayat 12 adalah:

Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam- meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga imbalan atau pembagian hasil keuntungan.⁷

⁵ Kasmir, **Manajemen Perbankan**, Edisi Revisi, Cetakan kesebelas, RajaGrafindo Persada, Jakarta 2014, hal 81

⁶ Hasibuan Malayu P. **Dasar-Dasar Perbankan**, Bumi Aksara, Jakarta 2008.

⁷ **Ibid.** hal 163

Dalam kata kredit mengandung berbagai maksud atau dengan kata lain dalam kata kredit terkandung unsur-unsur yang direkatkan menjadi satu. Sehingga jika kita bicara kredit, maka termasuk membicarakan unsur-unsur yang terkandung didalamnya. Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu kredit adalah sebagai berikut :

1. Kepercayaan

Kepercayaan merupakan suatu keyakinan bagi si pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan (baik berupa uang, barang atau jasa) benar-benar diterima kembali di masa yang akan datang sesuai jangka waktu kredit. Kepercayaan diberikan oleh bank sebagai dasar utama yang melandasi mengapa suatu kredit berani dikucurkan.

2. Kesepakatan

Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing. Kesepakatan ini kemudian dituangkan dalam akad kredit dan ditandatangani kedua belah pihak sebelum kredit dikucurkan.

3. Jangka Waktu

Setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Jangka waktu tersebut bisa berbetuk jangka pendek (dibawah 1 tahun), jangka menengah (1 sampai 3 tahun) atau jangka panjang (diatas 3 tahun). Jangka waktu merupakan batas waktu pengembalian angsuran kredit yang sudah disepakati kedua belah pihak.

4. Resiko

Akibat adanya tenggang waktu, maka pengembalian kredit akan memungkinkan suatu risiko tidak tertagihnya atau macet pemberian suatu kredit. Semakin panjang suatu jangka waktu kredit, maka semakin besar risikonya, demikian pula sebaliknya. Resiko ini menjadi tanggungan bank, baik resiko yang disengaja oleh nasabah, maupun resiko yang tidak sengaja, misalnya karena bencana alam atau bangkrutnya usaha nasabah tanpa ada unsur kesengajaan lainnya, sehingga nasabah tidak mampu lagi melunasi kredit yang diperolehnya.

5. Balas Jasa

Bagi bank balas jasa merupakan keuntungan atau pendapatan atas pemberian suatu kredit. Dalam bank jenis konvensional balas jasa kita kenal dengan nama bunga.

2.3.2 Tujuan Kredit Dan Jenis- jenis Kredit

Tujuan Utama Pemberian Kredit adalah sebagai berikut:

1. **Manfaat Kredit bagi Bank**
 - a. **Kredit yang diberikan bank kepada nasabah akan mendapatkan balas jasa berupa bunga**
 - b. **Pendapatan bunga bank berpengaruh pada peningkatan profitabilitas**
 - c. **Pemberian kredit kepada nasabah secara sinergi akan memasarkan produk lain seperti produk dana dan jasa**
 - d. **Kegiatan kredit dapat mendorong peningkatan kemampuan pegawai untuk lebih memahami secara perinci aktivitas usaha para debitur di berbagai sektor usaha**
2. **Manfaat kredit bagi Debitur**
 - a. **Meningkatkan usaha nasabah. Kredit yang diberikan oleh bank untuk memperluas volume usaha, misalnya kredit untuk membeli**

- bahan baku, pengadaan mesin dan peralatan, dapat membantu nasabah untuk volume produksi dan penjualan.
- b. Biaya kredit bank (provisi dan administrasi) pada umumnya murah
 - c. Bank menawarkan berbagai jenis kredit sehingga debitur dapat memilih jenis kreditur sesuai dengan tujuan penggunaannya
 - d. Bank juga memberikan fasilitas lainnya kepada debitur, sehingga debitur dapat menikmati fasilitas lainnya yang ditawarkan pihak bank.
 - e. Jangka waktu kredit disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan debitur dalam membayar kembali kredit tersebut, sehingga debitur dapat menyetimakan keuangan dengan tepat.
3. Manfaat kredit bagi pemerintah
 - a. Kredit dapat ditumbuhkan sebagai alat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
 - b. Kredit bank dapat digunakan sebagai alat pegendali moneter.
 - c. Kredit bank dapat menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat.
 - d. Secara tidak langsung kredit bank dapat meningkatkan pendapatan negara yaitu, pendapatan pajak.
 - i. Pajak pendapatan dari bank yang memberikan kredit karena terdapat kenaikan laba yang berasal dari bunga kredit.
 - ii. Pajak pendapatan dari debitur.
 - iii. Kredit bank dapat memperluas pasar, yaitu dengan semakin luasnya volume produksi dan konsumsi masyarakat
 4. Manfaat kredit bagi masyarakat luas
 - a. Mengurangi tingkat pengangguran
 - b. Melibatkan masyarakat yang memiliki profesi tertentu, misalnya akuntan, notaris, *appraisal independen*, dan asuransi
 - c. Memberikan rasa aman bagi masyarakat yang menggunakan pelayanan jasa perbankan.⁸

Pemberian suatu fasilitas kredit mempunyai beberapa tujuan yang hendak dicapai yang tentunya tergantung dari tujuan bank itu sendiri. Tujuan pemberian kredit juga tidak akan terlepas dari misi bank tersebut didirikan.

Dalam praktiknya tujuan pemberian suatu kredit sebagai berikut:

1. Mencari keuntungan

⁸ Ismail, *Manajemen Perbankan: Dari Teori Menuju Aplikasi*, Edisi Pertama, Cetakan Kesatu: Kencana, Jakarta, 2010, hal.97

Tujuan utama pemberian kredit adalah untuk memperoleh keuntungan. Hasil keuntungan diperoleh dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah.

2. **Membantu usaha nasabah**

Tujuan selanjutnya adalah untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik untuk investasi maupun dana untuk modal kerja.

3. **Membantu pemerintah**

Tujuan lainnya adalah membantu pemerintah dalam berbagai bidang. Bagi pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan, maka semakin baik, mengingat semakin banyak kredit berarti adanya kucuran dana dalam rangka peningkatan pembangunan di berbagai sektor, terutama sektor publik.⁹

Jenis kredit dibedakan berdasarkan sudut pendekatan yang kita lakukan yaitu berdasarkan tujuan kegunaannya, jangka waktu, macam, sektor perekonomian, agunan, golongan ekonomi, serta penarikan dan pelunasan.

a. Berdasarkan Tujuan/Kegunaannya

1. Kredit konsumtif yaitu kredit yang dipergunakan untuk kebutuhan sendiri bersama keluarganya, seperti kredit rumah atau mobil yang akan dipergunakan sendiri bersama keluarganya. Kredit ini tidak produktif.
2. Kredit modal kerja (kredit perdagangan) ialah kredit yang akan dipergunakan untuk menambah modal usaha debitur. Kredit ini produktif.
3. Kredit investasi ialah kredit yang dipergunakan untuk investasi produktif, tetapi baru akan menghasilkan dalam jangka waktu yang *relative* lama. Biasanya kredit ini diberikan *grace period*, misalnya kredit untuk perkebunan kelapa sawit, dan lain-lain,

⁹ Kasmir, **Dasar-Dasar Perbankan**, Edisi Revisi, Cetakan Keduabelas, RajaGrafindoPersada, Jakarta, 2014, hal.116-117

b. Berdasarkan Jangka Waktu

1. Kredit jangka pendek yaitu kredit yang jangka waktunya paling lama satu tahun saja.
2. Kredit jangka menengah yaitu kredit yang jangka waktunya antara satu sampai tiga tahun.
3. Kredit jangka panjang yaitu kredit yang jangka waktunya lebih dari tiga tahun.

c. Berdasarkan Macamnya

1. Kredit aksep yaitu kredit yang diberikan bank yang pada hakikatnya hanya merupakan pinjaman uang biasa sebanyak plafond kredit (L3/BMPK)-nya.
2. Kredit penjual yaitu kredit yang diberikan penjual kepada pembeli, artinya barang telah diterima pembayaran kemudian. Misalnya *Usance L/C*.
3. Kredit pembeli adalah pembayaran telah dilakukan kepada penjual, tetapi barangnya diterima belakangan atau pembelian dengan uang muka, misalnya *red clause L/C*.

d. Berdasarkan Sektor Perekonomian

1. Kredit pertanian ialah kredit yang diberikan kepada perkebunan, peternakan, dan perikanan.
2. Kredit perindustrian ialah kredit yang disalurkan kepada beraneka macam industri kecil, menengah, dan besar.

3. Kredit pertambangan ialah kredit yang disalurkan kepada beraneka macam pertambangan.
4. Kredit ekspor-impor ialah kredit yang diberikan kepada eksportir dan atau importer beraneka barang.
5. Kredit koperasi ialah kredit yang diberikan kepada jenis-jenis koperasi.
6. Kredit profesi ialah kredit yang diberikan kepada beraneka macam profesi, seperti dokter dan guru.

e. Berdasarkan Agunan/Jaminan

1. Kredit agunan orang ialah kredit yang diberikan dengan jaminan seseorang terhadap debitur bersangkutan.
2. Kredit agunan efek adalah kredit yang diberikan dengan agunan efek-efek dan surat-surat berharga.
3. Kredit agunan barang adalah kredit yang diberikan dengan agunan barang tetap, barang bergerak, dan logam mulia. Kredit agunan barang ini harus memperhatikan Hukum Perdata Pasal 1132 sampai dengan Pasal 1139.
4. Kredit agunan dokumen adalah kredit yang diberikan dengan agunan dokumen transaksi, seperti *letter of credit* (L/C).

f. Berdasarkan Golongan Ekonomi

1. Golongan ekonomi lemah, ialah kredit yang disalurkan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, seperti KUK KUT, dan lain-lain. Golongan ekonomi lemah adalah pengusaha yang kekayaan

maksimumnya sebesar Rp600 juta, tidak termasuk tanah dan bangunannya.

2. Golongan ekonomi menengah dan konglomerat adalah kredit yang diberikan kepada pengusaha menengah dan besar.

g. Berdasarkan penarikan dan Pelunasan

1. Kredit rekening Koran (kredit perdagangan) adalah kredit yang dapat ditarik dan dilunasi setiap saat, besarnya sesuai dengan kebutuhan; penarikan dengan cek, bilyet giro, atau pemindahan bukuan; pelunasannya dengan setoran-setoran. Bunga dihitung dari saldo harian pinjaman saja bukan dari besarnya plafond kredit. Kredit rekening Koran baru dapat ditarik setelah plafond kredit disetujui.
2. Kredit berjangka adalah kredit yang penarikannya sekaligus sebesar plafondnya. Pelunasan dilakukan setelah jangka waktunya habis. Pelunasan bisa dilakukan secara cicilan atau sekaligus, tergantung kepada perjanjian.

2.3.3 Syarat Kredit (*Term of Lending*)

Syarat kredit memuat berbagai syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh bank atas kredit baru atau berulang (*revolving*) sejak dari tanggal persetujuan kredit sampai dengan pelunasan (*repayment*). Maksud dari persyaratan kredit:

1. Agar bank mempunyai waktu untuk mengatur likuiditasnya
2. Bank dapat mengetahui perkembangan usaha nasabah
3. Untuk mengetahui penggunaan kredit oleh nasabah sesuai atau menyimpang dari kesepakatan

Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit adalah sebagai berikut:

1. Kepercayaan

Yaitu suatu keyakinan pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan (berupa uang, barang, atau jasa) akan benar-benar diterima kembali dimasa tertentu dimasa datang. Kepercayaan ini diberikan oleh bank, dimana sebelumnya sudah dilakukan penelitian menyelidikan tentang nasabah baik secara interen maupun eksteren. Penelitian dan penyelidikan tentang kondisi masa lalu dan sekarang terhadap nasabah pemohon kredit.

2. Kesepakatan

Disamping unsur percaya didalam kredit juga mengandung unsur kesepakatan antara si pemberi kredit dengan si penerima kredit. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing.

3. Jangka waktu

Setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Jangka waktu tersebut bisa berbentuk jangka pendek, jangka menengah atau jangka panjang,

4. Risiko

Adanya suatu tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan suatu resiko tidak tertagihnya/ macet pemberian kredit. Suatu kredit semakin besar resikonya demikian pula sebaliknya. Risiko ini menjadi tanggungan bank, baik risiko yang disengaja oleh nasabah yang lalai, maupun oleh risiko yang tidak sengaja. Misalnya terjadi bencana alam atau bangkrutnya usaha nasabah tanpa ada unsur kesengajaan lainnya

5. Balas jasa

Merupakan keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa tersebut yang kita kenal dengan nama bunga. Balas jasa dalam bentuk bunga dan biaya administrasi kredit ini merupakan keuntungan bank. Sedangkan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah balas jasanya ditentukan dengan bagi hasil.¹⁰

2.3.4 Prinsip-prinsip Pemberian Kredit

¹⁰ Kasmir : **Dasar- Dasar Perbankan**, Edisi Revisi Cetakan 12 Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014 Hal.114-115

Sebelum suatu fasilitas kredit yang diberikan, maka bank harus merasa yakin bahwa kredit yang diberikan benar-benar akan kembali. Keyakinan tersebut diperoleh dari hasil penilaian kredit sebelum kredit tersebut disalurkan. Penilaian kredit oleh bank dapat dilakukan dengan berbagai cara untuk mendapatkan keyakinan tentang nasabahnya, seperti melalui prosedur penilaian yang benar dan sungguh-sungguh. Biasanya kriteria penilaian yang umum dan harus dilakukan oleh bank untuk mendapatkan nasabah yang benar-benar layak untuk diberikan pinjaman, dilakukan dengan analisis 5C dan 7P.

Prinsip pemberian kredit dengan analisis 5C dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. *Character*
2. *Capacity*
3. *Capital*
4. *Collateral*
5. *Condition*¹¹

Adapun penjelasan 5C diatas adalah sebagai berikut:

1. *Character*

Character adalah sifat atau watak seseorang dalam hal ini calon debitur.

Tujuannya adalah memberikan keyakinan kepada bank bahwa sifat atau watak dari orang- orang yang akan diberikan kredit benar- benar dapat dipercaya.

2. *Capacity*

¹¹ Kasmir, **Manajemen Perbankan**, Edisi Revisi, Rajawali Pers, Jakarta ,2019, hal 101

Untuk melihat kemampuan calon nasabah dalam membayar kredit yang dihubungkan dengan kemampuannya mengelola bisnis serta kemampuannya mencari laba

3. *Capital*

Capital adalah untuk mengetahui sumber-sumber pembiayaan yang dimiliki nasabah terhadap usaha yang akan dibiayai oleh bank.

4. *Collateral*

Collateral adalah jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan juga harus diteliti keabsahannya, sehingga jika terjadi sesuatu masalah jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin. Fungsi jaminan adalah sebagai pelindung bank dari resiko kerugian.

5. *Condition*

Dalam menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi sekarang dan untuk dimasa yang akan datang sesuai sektor masing-masing.

Penilaian kredit dengan metode analisis 7P adalah sebagai berikut:

1. *Personality* (kepribadian) adalah sifat dan perilaku yang dimiliki calon debitur yang mengajukan permohonan kredit bersangkutan, dipergunakan sebagai dasar pertimbangan pemberian kredit. Jika kepribadiannya baik, kredit dapat diberikan, sebaliknya apabila kepribadiannya jelek maka kredit tidak akan diberikan.
2. *Party* adalah mengklasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi-klasifikasi atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, karakter, dan

loyalitasnya, dimana setiap klasifikasi nasabah akan mendapatkan fasilitas yang berbeda dari bank.

3. *Purpose* (tujuan) adalah tujuan dan penggunaan kredit oleh calon debitur, apakah untuk kegiatan konsumtif atau sebagai modal kerja. Tujuan kredit ini menjadi hal yang menentukan apakah permohonan calon debitur disetujui atau ditolak.
4. *Prospect* adalah prospek perusahaan di masa datang, apakah akan menguntungkan (baik) atau merugikan (jelek). Jika prospek terlihat baik maka kredit dapat diberikan, sebaliknya jika jelek maka kredit ditolak.
5. *Payment* (pembayaran) adalah mengetahui bagaimana pembayaran kembali kredit yang diberikan. Asas *payment* ini harus dipergunakan sebagai bahan pertimbangan pemberian kredit agar pengembalian kredit berjalan lancar.
6. *Profitability* adalah untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah mendapatkan laba. *Profitability* diukur per periode, apakah konstan atau meningkat dengan adanya pemberian kredit.
7. *Protection* bertujuan agar usaha dan jaminan mendapatkan perlindungan. Perlindungan dapat berupa jaminan barang, jaminan orang, atau jaminan asuransi.

2.4 Prosedur Pemberian Kredit

Prosedur pemberian kredit maksudnya adalah tahap- tahap yang harus dilalui sebelum sesuatu kredit diputuskan untuk dikucurkan. Tujuannya adalah untuk mempermudah bank dalam menilai kelayakan suatu permohonan kredit.

Prosedur pemberian kredit secara umum dapat dibedakan antara pinjaman perseorangan dengan pinjaman oleh suatu badan hukum, kemudian dapat pula ditinjau dari segi tujuannya apakah untuk konsumtif atau produktif.

Secara umum akan dijelaskan prosedur pemberian kredit oleh badan hukum menurut Kasmir adalah sebagai berikut:

- 1. Pengajuan Proposal**
- 2. Penyelidikan berkas pinjaman**
- 3. Penilaian kelayakan kredit**
- 4. Wawancara pertama**
- 5. Peninjauan Ke Lokasi (*On the Spot*)**
- 6. Wawancara kedua**
- 7. Keputusan kredit**
- 8. Penandatanganan akad kredit/ perjanjian lainnya**
- 9. Realisasi kredit**¹²

Adapun penjelasan mengenai prosedur pemberian kredit adalah sebagai berikut:

1. Pengajuan Proposal

Dalam hal ini permohonan kredit mengajukan permohonan kredit yang dituangkan dalam suatu proposal. Kemudian dilampiri dengan berkas- berkas lainnya yang dibutuhkan. Pengajuan proposal kredit hendaknya yang berisi antara lain sebagai berikut:

- a. Latar belakang perusahaan seperti riwayat hidup singkat perusahaan, jenis bidang usaha, identitas perusahaan, nama pengurus berikut pengetahuan dan pendidikannya, perkembangan perusahaan serta relasinya dengan pihak- pihak pemerintah dan swasta.

¹² Kasmir, **Manajemen Perbankan**, Edisi Revisi Kedelapan: Rajawali, Jakarta, 2008, hal 96.

- b. Maksud dan tujuan, apakah untuk memperbesar omset penjualan atau meningkatkan kapasitas produksi atau mendirikan pabrik baru (perluasan) serta tujuan lainnya.
- c. Besarnya kredit dan jangka waktu, dalam hal ini pemohon menentukan besarnya jumlah kredit yang ingin diperoleh dan jangka waktu kreditnya. Penilaian kelayakan besarnya kredit dan jangka waktunya dapat kita lihat dari *cash flow* serta laporan keuangan (neraca dan laporan laba rugi) tiga tahun terakhir. Jika dari hasil analisis tidak sesuai dengan permohonan, maka pihak kreditur tetap berpedoman terhadap hasil analisis mereka, dalam memutuskan jumlah kredit dan jangka waktu kredit yang layak diberikan kepada pemohon.
- d. Cara pemohon mengembalikan kredit, dijelaskan secara rinci cara- cara nasabah dalam mengembalikan kreditnya, apakah dari hasil penjualan atau cara lainnya.
- e. Jaminan kredit, hal ini merupakan jaminan untuk menutupi segala resiko terhadap kemungkinan macetnya suatu kredit baik yang ada unsur kesengajaan atau tidak. Penilaian jaminan kredit haruslah teliti jangan sampai terjadi sengketa, palsu, dan sebagainya. Biasanya jaminan diikat dengan suatu asuransi tertentu. Selanjutnya proposal ini dilampiri dengan berkas-berkas yang telah dipersyaratkan seperti :
 - i. Akte Notaris, dipergunakan untuk perusahaan yang berbentuk PT (Perseroan Terbatas) atau yayasan.

- ii. TDP (Tanda Daftar Perusahaan), merupakan tanda daftar perusahaan yang dikeluarkan oleh departemen perindustrian dan perdagangan dan biasanya berlaku lima tahun, jika habis dapat diperpanjang kembali.
- iii. NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), nomor pokok wajib pajak, dimana sekarang ini setiap pemberian kredit terus dipantau oleh Bank Indonesia adalah NPWP-nya.
- iv. Neraca dan laporan laba rugi tiga tahun terakhir.
- v. Bukti diri dari pimpinan perusahaan.
- vi. Foto kopi sertifikat jaminan.

2. Penyelidikan Berkas Pinjaman

Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah berkas yang diajukan sudah lengkap sesuai persyaratan dan sudah benar. Jika menurut pihak perusahaan perkreditan belum lengkap atau cukup, maka nasabah diminta untuk segera melengkapinya dan apabila sampai batas tertentu nasabah tidak sanggup melengkapi kekurangan tersebut, maka sebaiknya permohonan kredit dibatalkan saja.

3. Penilaian Kelayakan Kredit

Merupakan penyidikan kepada calon debitur dengan langsung berhadapan dengan calon debitur, untuk menyakinkan apakah berkas-berkas tersebut sesuai dan lengkap seperti dengan pihak kreditur inginkan. Wawancara ini juga untuk mengetahui keinginan dan kebutuhan nasabah yang sebenarnya.

Hendaknya dalam wawancara ini dibuat serilek mungkin sehingga diharapkan hasil wawancara akan sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

4. Wawancara pertama

Merupakan kegiatan pemeriksaan ke lapangan dengan meninjau berbagai objek yang akan dijadikan usaha atau jaminan. Kemudian hasil *on the spot* hendaknya jangan diberitahu kepada nasabah. Sehingga apa yang kita lihat di lapangan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

5. Peninjauan Ke Lokasi (*On the spot*)

Merupakan kegiatan perbaikan berkas, jika mungkin ada kekurangan-kekurangan pada saat setelah dilakukan *on the spot* dilapangan. Catatan yang ada pada permohonan dan pada saat wawancara I dicocokkan dengan pada saat *on the spot* apakah ada kesesuaian dan mengandung suatu kebenaran.

6. Wawancara kedua

Keputusan kredit dalam hal ini adalah menentukan apakah kredit akan diberikan atau ditolak, jika diterima, maka dipersiapkan administrasinya, biasanya keputusan kredit akan mencakup :

- a. Jumlah uang yang diterima.
- b. Jangka waktu kredit.
- c. Dan biaya-biaya yang harus dibayar.

7. Keputusan kredit

Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari diputuskannya kredit, maka sebelum kredit dicairkan maka terlebih dahulu calon nasabah menandatangani akad kredit, mengikat jaminan dengan hipotek dan surat perjanjian atau pernyataan

yang dianggap perlu. Penandatanganan dilaksanakan antara pihak kreditur dengan debitur secara langsung atau melalui notaris.

8. Penandatanganan akad kredit/ perjanjian lainnya

Realisasi kredit diberikan setelah penandatanganan surat-surat yang diperlukan dengan membuka rekening giro atau tabungan dan juga memberikan langsung sesuai jenis kredit.

9. Realisasi kredit

Adalah pencairan atau pengambilan uang atau barang sesuai jenis kredit sebagai realisasi dari pemberian kredit dan dapat diambil sesuai ketentuan dan tujuan kredit yaitu sekaligus atau bertahap.

2.5 Kriteria Pengendalian Intern Pemberian Kredit yang Efektif

Setiap bank harus memiliki struktur pengendalian intern yang memadai dalam pemberian kredit kepada debitur. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang yang nantinya akan mengakibatkan penurunan profitabilitas. Beberapa pokok utama dalam pengendalian intern kredit menurut Tjukria P. Tawaf (dalam skripsi Anderson Marbun) adalah:

- 1. Harus ada sistem pengendalian intern yang baik dalam arti adapemisahan fungsi antara pejabat yang menyetujui kredit, yang melakukan pembayaran kepada debitur, penagihan, analisis, administrasi kredit, dan taksasi agunan.**
- 2. Harus ada kebijakan perkreditan tertulis yang telah disetujui direksi. Kebijakan tertulis mengenai kredit paling tidak harus memuat ketentuan mengenai limit cabang dan limit pemberi persetujuan; ketentuan mengenai jenis kredit yang dilarang; ketentuan mengenai jangka waktu kredit (maksimum dan minimum); ketentuan mengenai tingkat bunga dan provisi; ketentuan mengenai perbandingan antara kredit dengan jaminan; informasi keuangan yang harus diperoleh dari debitur; konsentrasi kredit; dan pengertian kredit bermasalah dan penangannya.**

3. **Harus ada aparat yang kompeten yang akan memproses kredit. Artinya para pengelola kredit di koperasi harus mempunyai pengetahuan yang cukup serta keterampilan yang memadai dalam menangani permasalahan kreditnya.**
4. **Harus ada fungsi review terhadap kredit yang telah diberikan dan manajemen harus selalu memantau pelaksanaan *review* serta tindak lanjut atas masalah yang ada harus dilakukan secara terus menerus dan dibangun dengan sistem yang terorganisir sehingga mampu melakukan deteksi dini atas permasalahan yang ada berikut penanganan tindak lanjutnya.”¹³**

Dari uraian diatas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa pengendalian intern yang efektif dalam pemberian kredit adalah:

1. Adanya pemisahan fungsi antara pejabat yang terkait
2. Adanya kebijakan atau peraturan yang ketat terhadap pemberian kredit
3. Adanya pejabat yang kompeten dibidangnya
4. Adanya *review* terhadap pelaksanaan kredit yang telah diberikan secara terus menerus.

¹³ Anderson Marbun, Skripsi: **Peranan Pengendalian Intern Dalam Menunjang Efektivitas Sistem Pemberian Kredit Usaha Kecil dan Menengah (Studi Kasus pada Koperasi Simpan Pinjam Artha Jaya Sentosa Jakarta)**, Universitas Widyatama, Bandung, 2006, hal 42.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Objek dan Subjek Penelitian

Objek Penelitian yang diambil dalam penelitian ini adalah Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemberian Kredit Pada PT. Bank Sumut Cabang Simpang Kwala Unit KCP Pancur Batu, Medan. Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara.

3.2 Jenis dan Metode Pengumpulan Data

3.2.1 Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

1. Data Primer, adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan yang berhubungan dengan penelitian ini yaitu pihak- pihak yang terkait dalam pemberian kredit pada Bank Sumut Kantor Cabang Simpang Kwala Unit KCP Pancur Batu ,Medan
2. Data Sekunder, adalah data yang diperoleh secara langsung dari perusahaan berupa data dan dokumen pendukung yang ada dalam pemberian kredit pada Bank Sumut Cabang Simpang Kwala Unit KCP Pancur Batu, Medan.

3.2.2 Metode Pengumpulan Data

Dalam mencari dan mengumpulkan data yang diperlukan untuk melaksanakan penelitian pada PT. Bank Sumut, penulis melakukan penelitian sebagai berikut:

a. Metode Wawancara (*interview*)

Menurut Wahyu Purhantara :

Wawancara adalah proses percakapan dengan maksud untuk mengkontruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, motivasi, perasaan dan sebagainya yang dilakukan dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan kepada orang lain yang diwawancarai (*interviewee*).¹⁴

Dalam penelitian ini dilakukan wawancara secara terstruktur. Menurut Tony Wijaya wawancara adalah: “**Pengajuan pertanyaan dengan berpedoman pada pola atau daftar yang telah disiapkan sebelumnya.**”¹⁵ Wawancara ini dilakukan secara langsung dan terbuka kepada pegawai PT. Bank Sumut Cabang Simpang Kwala Unit KCP Pancur Batu, Medan. Pada penelitian kali ini responden akan menjawab pertanyaan tentang prosedur pemberian kredit serta prinsip pemberian kredit dengan analisis 5C.

b. Dokumentasi

Studi dokumentasi merupakan pengumpulan data dan informasi dan buku-buku jurnal, internet dan sumber lain yang berhubungan objek penelitian yang akan digunakan sebagai acuan dan bahan pertimbangan terhadap apa yang ada dilapangan.

Dokumen yang dikumpulkan adalah Sejarah singkat perusahaan, struktur organisasi dan *Job Description* pada PT. Bank Sumut Cabang Simpang Kwala Unit KCP Pancur Batu.

¹⁴ **Ibid**, hal 80

¹⁵ Tony Wijaya, **Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis : Teori dan Praktik**, Edisi Pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013, hal 23

3.3 Metode Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif.

Menurut Sonny Leksono metode deskriptif adalah:

Sebuah pendekatan terhadap sesuatu perilaku, fenomena, peristiwa, masalah atau keadaan tertentu yang menjadi objek penyelidikan; yang hasil temuannya berupa uraian-uraian kalimat bermakna yang menjelaskan pemahaman tertentu.¹⁶

Penggunaan metode deskriptif ini menggunakan suatu metode analisis untuk mengumpulkan data, menyusun dan mengklasifikasikan serta menginterpretasikan data yang diperoleh, sehingga memberikan gambaran umum mengenai penerapan akuntansi pertanggungjawaban.

Tujuan dari penelitian deskriptif ini yaitu untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta- fakta, sifat- sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki. Penelitian ini tidak menguji hipotesa atau tidak menggunakan hipotesa, melainkan hanya mendeskripsikan informasi apa adanya sesuai dengan variabel- variabel yang diteliti.

¹⁶ Sonny Leksono, **Penelitian Kualitatif Ilmu Ekonomi: Dari Metodologi ke Metode**, Edisi Pertama, Cetakan Pertama, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, ha181

